

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dasar acuan untuk melihat perekonomian suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi juga merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, meningkatnya output perkapita akan berdampak pada pola konsumsi masyarakat (Boediono,1992).

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki kaitan dengan tersedianya barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan dengan pendapatan nasional yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada umumnya pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sesuai dari tujuan utama setiap bangsa yaitu ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-empat:

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara merupakan proses terencana dan berkesinambungan agar tercapainya pembangunan dalam segala bidang. Menurut Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai arti pengelolaan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui perubahan kemampuan berorganisasi. Dan

dalam UU No 22 tahun 2009 tentang pemerintah daerah serta UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang telah dirubah menjadi UU No.32 dan 33 tahun 2004 yang dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya mempunyai wewenang untuk menentukan arah pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian di perlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menggunakan modal pembangunan secara bijak dan tepat. Modal pembangunan sebaiknya digunakan sebagai pembiayaan atas kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menunjang perekonomian. Salah satu caranya dengan melakukan investasi pada sektor yang produktif seperti semua jenis investasi atau penanaman modal yang menambah sumber daya baru sehingga membuat peningkatan pada stok modal suatu negara dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional (Arsyad,2004). Sesuai dengan model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar “*steady growth theory*” yang menekankan peran penting penanaman modal dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi. Modal yang digunakan untuk sarana dan prasana bagi masyarakat dapat menjadi modal penunjang dari terlaksananya aktivitas ekonomi masyarakat.

Tidak hanya dalam pengeluaran pemerintah seperti belanja modal, pendapatan pemerintah pun menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Bahl (2002) bahwa desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan daerah untuk memperoleh penerimaan daerah seperti penerimaan pajak, karena penerimaan daerah mempunyai pengaruh sebagai

sumber dana dalam melakukan pembangunan. Sesuai dengan UU No 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara yang digunakan untuk keperluan negara. Sehingga meningkatnya penerimaan pajak dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan pemerintah dan kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional, asalkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk menunjang pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain penerimaan pajak dan belanja modal, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Menurut Dyah Losina (2008) inflasi adalah proses kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus atau turunnya nilai uang yang terus menerus. Inflasi terjadi ketika permintaan lebih besar dari penawaran sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan dalam harga-harga. Inflasi mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika inflasi yang terjadi cukup tinggi maka akan berdampak terhadap daya beli masyarakat yang menurun sehingga membuat perekonomian menjadi melemah. Namun hal yang berbeda akan terjadi ketika inflasi yang terjadi dikategorikan ringan, inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, hal ini karena inflasi mampu memberikan dampak terhadap produsen sehingga mereka meningkatkan hasil produksinya.

Dilihat dari data BPS tahun 2005 sampai tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.70% kemudian pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan menjadi 5.50%, perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi akibat melemahnya kegiatan ekonomi dan masih

rentannya kondisi pasar finansial (BankIndonesia, 2007). Kemudian pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan menjadi 6.28% yang pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Namun secara rata-rata selama periode 2005 sampai 2008 pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5.88% .

Di lihat dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mempunyai tren yang positif dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Pada tahun 2005 belanja modal pemerintah Indonesia mencapai Rp 32.88 triliun kemudian pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp 54.95 triliun atau meningkat sebesar 67.08% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh cepatnya penyelesaian dokumen anggaran dari tahun sebelumnya sehingga membuat pengeluaran belanja modal pemerintah lebih meningkat dari tahun 2005. Dan pada tahun 2007-2008 belanja modal pemerintah Indonesia kembali mengalami peningkatan dari Rp 64.28 triliun kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 72.72 triliun atau tumbuh sebesar 13.19%. Namun secara rata-rata selama tahun 2005 sampai tahun 2008 belanja modal pemerintah meningkat sebesar 32.42%, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan penghematan agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat.

Sama halnya dengan belanja modal, tingkat penerimaan pajak Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2005 total penerimaan pajak yang di dapatkan pemerintah Indonesia mencapai Rp 347.03 triliun, kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi Rp 409.20 triliun atau tumbuh sebesar 17.91%. Peningkatan ini terjadi karena semakin gencarnya pemerintah dalam melakukan program intensifikasi



dan ekstensifikasi (Bank Indonesia, 2007). Sementara itu penerimaan pajak pada tahun 2007 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 19.98%. Dan pada tahun 2008 penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 658.70 triliun atau sebesar 34.15% dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak selama periode 2005-2008 memperlihatkan angka yang terus meningkat yaitu Rp 347.03 pada tahun 2005 menjadi Rp 658.70 pada tahun 2008, secara rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia sebesar 24.13%, hal tersebut disebabkan karena perbaikan pertumbuhan ekonomi dan hasil dari kegiatan modernisasi seperti pembuatan mapping profil (ortax.org).

Selain itu, tingkat inflasi Indonesia dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun 2005 hingga tahun 2008 (BPS, 2005-2008). Pada tahun 2005 tingkat inflasi Indonesia sebesar 17.11% kemudian pada tahun 2006 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6.60%, penurunan tersebut didukung oleh menurunnya harga komoditas, baik migas maupun nonmigas (Bank Indonesia, 2007). Dan pada periode selanjutnya tingkat inflasi di Indonesia mengalami peningkatan, yang pada tahun 2007 sebesar 6.59% kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 11.06%. Namun secara rata-rata selama periode 2005-2008 pertumbuhan tingkat inflasi Indonesia sebesar 10.34%. Peningkatan inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga komoditas internasional terutama minyak dan pangan, sehingga hal tersebut berdampak terhadap *administered price* dan juga terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga membuat tekanan inflasi pada menjadi tinggi.

Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam periode empat tahun dari 2005 sampai 2008

mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5.73% kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 6.14%, hal ini terjadi karena besarnya konsumsi rumah tangga di bandingkan tahun sebelumnya dan juga adanya pertumbuhan ekspor yang tinggi sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat meningkat (Bank Indonesia, 2007). Dan pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan menjadi 6.34%, peningkatan tersebut disebabkan oleh PDRB yang berasal dari sektor pertanian, angkutan dan komunikasi, perdagangan serta hotel dan restoran yang berkembang dengan baik. Pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan menjadi 6.88% hal ini disebabkan karena masih stabilnya stimulus fiskal pemerintah baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi dan juga perkembangan ekspor yang stabil meskipun krisis global sedang terjadi (Bank Indonesia, 2009). Sehingga secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama periode 2005-2008 tumbuh sebesar 6.27%.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, belanja modal di Sumatera Barat dalam periode 2005 sampai 2008 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 belanja modal pemerintah Sumatera Barat sebesar Rp 116.768 milyar kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi Rp 160.474 milyar atau meningkat sebesar 37.42%, hal tersebut terjadi karena banyaknya proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga membuat belanja modal pada tahun 2006 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 dan 2008 belanja modal kembali mengalami peningkatan dari Rp 165.080 milyar pada tahun 2007 dan Rp 204.092 milyar pada tahun 2008 atau tumbuh sebesar 23.63%,

sama seperti tahun sebelumnya peningkatan tersebut terjadi karena banyaknya pembayaran proyek yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi (Bank Indonesia, 2009). Namun secara rata-rata belanja modal pemerintah Sumatera Barat selama periode 2005-2008 tumbuh sebesar 21.30%.

Sama halnya dengan belanja modal, tingkat penerimaan pajak pemerintah Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai 2008 (BPS, 2005-2008). Pada tahun 2006 tingkat penerimaan pajak Sumatera Barat mengalami peningkatan menjadi Rp. 107.2 milyar yang pada tahun sebelumnya hanya sebesar Rp 92.2 milyar atau tumbuh sebesar 16.29%. Kemudian pada tahun 2007 penerimaan pajak Sumatera Barat kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 119.5 milyar atau tumbuh sebesar 11.4% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2008 tingkat penerimaan pajak Sumatera Barat kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 137.6 milyar atau tumbuh sebesar 15.18% dari tahun sebelumnya, peningkatan tersebut di dasari oleh perbaikan dalam administrasi perpajakan. Penerimaan pajak selama periode 2005-2008 mengalami peningkatan tiap tahunnya, secara rata-rata penerimaan pajak Sumatera Barat tumbuh sebesar 14.29%.

Selain itu, inflasi Sumatera Barat selama periode 2005 sampai 2008 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 tingkat inflasi yang ada di Sumatera Barat sebesar 20.47% kemudian pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 8.05%, penurunan tersebut terjadi karena telah hilangnya dampak dari kenaikan harga BBM sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap inflasi dalam kategori *administered price* yang membuat tingkat inflasi pada tahun 2006 mengalami

penurunan (Bank Indonesia, 2007). Dan pada tahun 2007-2008 tingkat inflasi di Sumatera Barat mengalami peningkatan, yang pada tahun 2007 tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 6.9% kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 12.68%, peningkatan tersebut disebabkan karena kurang lancarnya pasokan serta manajemen stok yang kurang optimal dan juga faktor cuaca yang kurang kondusif membuat beberapa harga kebutuhan pokok menjadi meningkat (Bank Indonesia, 2009). Meskipun tingkat inflasi di Sumatera Barat mengalami fluktuasi, namun secara rata-rata tingkat inflasi Sumatera Barat tumbuh sebesar 12.12% selama periode 2005-2008.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belanja modal, penerimaan pajak dan inflasi. Maka penulis tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Belanja Modal, Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat**” dengan analisis data dari tahun 1986-2015.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penerimaan pajak, belanja modal dan tingkat inflasi. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, belanja modal, penerimaan pajak dan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat selama periode 1986-2015?.



2. Bagaimana pengaruh belanja modal, penerimaan pajak dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat selama periode 1986-2015?

### 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Menganalisis pertumbuhan ekonomi, belanja modal, penerimaan pajak dan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat selama periode 1986-2015.
- 1.3.2 Menganalisis pengaruh belanja modal, penerimaan pajak dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat selama periode 1986-2015.

### 1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai masukan dan informasi sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi dalam disiplin ilmu yang dipelajari.
- 1.4.2 Bagi pemerintah (*policy maker*) dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, khususnya kebijakan pemerintah dalam menganggarkan pengeluaran pemerintah dalam RAPBD

1.4.3 Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai informasi bagi peneliti yang berminat mengembangkan penelitian lebih lanjut.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini hanya akan membahas tentang analisis pengaruh belanja modal, penerimaan pajak dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat dari tahun 1986 – 2015.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

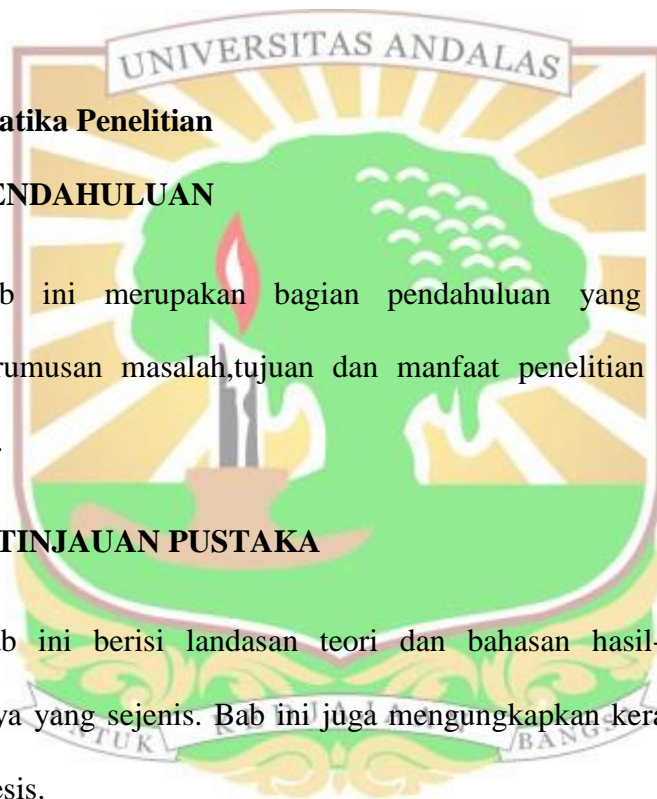
#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilandaskan secara operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

#### **BAB IV: GAMBARAN UMUM**



Membahas hasil penelitian yang meliputi deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian, pembahasan dan implikasi kebijakan.

## **BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari proses pengamatan serta saran

